

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan nasional, negara membutuhkan dana yang besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan nasional. Besarnya jumlah peningkatan dan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak (Utami, dkk, 2012). Dalam hal ini pajak memiliki peran yang sangat penting, karena pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung yang ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Mardiasmo, 2009). Pajak sendiri memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur. Fungsi budgetair adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara. Sedangkan fungsi mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan suatu kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak merupakan suatu unsur penerimaan terbesar negara yang nantinya akan digunakan sebagai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Peranan pajak dalam membiayai pengeluaran umum negara sangat penting, dikarenakan ketika sumber daya alam tidak lagi bisa digunakan atau diandalkan, maka sumber penerimaan pajak yang akan menopang pembiayaan negara. Pajak dapat diartikan

sebagai sumber pendapatan negara yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara. Pemerintah dan Dirjen pajak secara terus-menerus berusaha meningkatkan penerimaan negara agar dapat meningkatkan pembangunan negara. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah memiliki kendala atau masalah. Adapun masalah tersebut adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai keikhlasan seseorang untuk berkontribusi kepada negara yang akan digunakan membiayai pengeluaran umum negara (Widayati dan Nurlis, 2010).

Berikut ini adalah data penerimaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2013, periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013:

Tabel 1.1
Data penerimaan pajak
(Milliar)

No	Jenis pajak	Realisasi 2012	APBN 2013	Target(%) 2012-2013	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Growth (%)
1	PPh ps 21	79,559.16	101,915.00	28.10	79,559.16	89,897.55	12.99
2	PPh ps 22	5,495.81	6,600.93	20.11	5,495.81	6,766.39	23.12
3	PPh ps 22 (impor)	31,609.47	42,704.15	35.10	31,609.47	36,329.63	14.93
4	PPh ps 23	20,290.36	24,530.78	20.90	20,290.36	22,140.83	9.12
5	PPh Ps 25/29 OP	3,763.25	6,443.34	71.22	3,763.25	4,378.79	16.36
6	PPh ps 25/29 Badan	152,624.89	180,116.52	18.01	152,624.89	151,906.61	(0.47)
7	PPh ps 26	27,458.53	32,779.51	19.38	27,458.53	31,082.96	13.20
8	PPh Final	60,369.81	69,349.09	14.87	60,369.81	71,357.41	18.20
9	PPh Non Migas lainnya	32.70	42.56	30.16	32.70	37.79	15.59

Sumber: www.pajak.go.id

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa untuk jenis pajak PPh ps 25/29 Orang Pribadi (OP) terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 16,36 % dari realisasi tahun 2012-2013. Akan tetapi tingkat pertumbuhan yang meningkat belum bisa mencapai target pemerintah. Untuk pajak PPh ps 25/29 OP Dirjen pajak telah menetapkan target sebesar 71,22 % untuk tahun 2012-2013. Tingkat pertumbuhan sebesar 16,36 % ternyata masih jauh dari harapan yang ditargetkan oleh pemerintah dan dirjen pajak yaitu sebesar 71,22 %. Hal inilah yang harus membuat pemerintah berusaha lebih keras untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak.

Data penerimaan pajak tahun 2013, Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data penerimaan pajak
(Milliar)

N o	Jenis pajak	Realisasi 2013	APBN 2014	Target (%) 2013-2014	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Growth (%)
1	PPh ps 21	90.130,28	116.824,90	29,62	9.638,76	10.692,27	10,93
2	PPh ps 22	6.834,03	10.370,31	51,75	437,34	493,75	12,90
3	PPh ps 22 (impor)	36.331,69	50.014,27	37,66	2.827,68	3.587,66	26,88
4	PPh ps 23	22.206,45	37.309,97	68,01	1.985,07	2.440,88	22,96
5	PPh Ps 25/29 OP	4.384,02	7.355,44	67,78	194,24	191,55	(1,38)
6	PPh ps 25/29 Badan	155.066,47	174.763,74	12,70	6.618,93	11.748,08	77,49
7	PPh ps 26	31.100,12	39.022,03	25,47	2.549,76	11.748,08	29,82
8	PPh Final	71.565,73	74.515,96	4,12	5.226,66	6.432,15	23,06
9	PPh Non Migas lainnya	37,80	56,23	48,75	3,24	4,32	33,22

Sumber: www.pajak.go.id

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa untuk jenis pajak PPh ps 25/29 OP hanya terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 1,38 %, jauh dari harapan pemerintah yang menetapkan target tingkat pertumbuhan sebesar 67,78 %

dari realisasi tahun 2013-2014. Jika dibandingkan dengan data penerimaan pajak tahun 2013 periode 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2013, terjadi tingkat penurunan pertumbuhan yang signifikan. Artinya bahwa tingkat kemauan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak semakin berkurang. Dalam hal ini, berarti bahwa pemerintah harus berkerja lebih keras lagi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

Ketidaktaatan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak akan dapat menurunkan tingkat penerimaan pajak, sehingga akan merugikan negara. Untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak bukanlah suatu hal yang mudah disamping peran aktif dari pemerintah, akan tetapi dituntut dari kemauan masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Benjamin (2013) mengatakan bahwa penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Dalam praktiknya, banyak terjadi penyalahgunaan pajak yang sering ditimbulkan oleh oknum pajak itu sendiri. Banyaknya berita tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terutama dalam bidang perpajakan membuat masyarakat memiliki persepsi yang negatif. Masyarakat beranggapan jika mereka membayar pajak, maka hasil pajak yang dibayarkan tersebut hanya dinikmati oleh kalangan yang tidak bertanggung jawab, sehingga memicu masyarakat untuk tidak mau membayar pajak (Benjamin, 2013). Peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak mendekati tercapai. Pemerintah harus melakukan kajian-kajian yang berkenaan dengan prinsip dasar pada diri wajib pajak. Prinsip dasar yang dimaksud adalah hasrat atau dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas dalam sistem perpajakan. Kesadaran memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Apabila masyarakat sadar betapa pentingnya membayar pajak dan masyarakat sadar akan manfaat yang diterima dalam membayar pajak, maka masyarakat tersebut akan cenderung untuk mau membayar pajak. Pengetahuan merupakan hal yang penting dalam kehidupan, terutama pengetahuan tentang peraturan pajak. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, maka masyarakat akan cenderung untuk membayar pajak. Maka dari itu pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Masyarakat yang memiliki persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan akan cenderung untuk mau membayar pajak, dikarenakan apabila masyarakat mau membayar pajak maka mereka beranggapan telah turut berkontribusi dalam pemabangunan nasional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh James (2005), tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan dan hukum yang dijalankan oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan baik, sehingga mendorong masyarakat untuk mau membayar pajak. Masyarakat percaya apabila mereka membayar pajak, maka mereka akan merasakan manfaat yang diterima dalam bentuk pemabangunan nasional. Penelitian ini didasari dengan adanya penelitian yang dilakukan Rantung dan Adi (2009), Widayati dan Nurlis (2010) dan penelitian Anggraeni (2011) yang menggunakan tiga variabel dalam penelitian mereka, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Sedangkan untuk variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum didasari dengan penelitian yang dilakukan oleh James (2005).

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2011) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas”. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini menambah dua variabel independen, yaitu variabel sanksi perpajakan dan kualitas layanan fiskus atau petugas pajak. Variabel sanksi perpajakan dan kualitas layanan fiskus atau petugas pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dikarenakan apabila dengan adanya sanksi perpajakan dari pemerintah dan didukung dengan adanya kualitas

layanan fiskus atau petugas pajak yang memenuhi standat pelayanan yang ditetapkan maka masyarakat mau untuk membayar pajak.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi empiris di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta)”. Dalam hal ini peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti melihat dari data diatas terjadi tingkat penurunan pertumbuhan pada periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak, yang menyebabkan terjadi tingkat penurunan pertumbuhan dari target yang telah ditetapkan oleh Dirjen pajak. Peneliti juga ingin mengetahui apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sanksi perpajakan dan kualitas layanan fiskus atau petugas pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak yang selama ini menjadi masalah bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan harapan dapat mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh dalam peningkatan kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, yang nantinya dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (membuka tempat praktek kerja), yaitu pekerjaan

yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2011) menyarankan agar lebih menspesifikasikan jenis pekerjaannya, agar lebih spesifik hasil yang diperoleh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
6. Apakah kualitas layanan fiskus atau petugas pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
6. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan fiskus atau petugas pajak perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi berupa tulisan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dalam bidang perpajakan.
 - b. Diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

2. Manfaat Praktik

- a. Sebagai bahan referensi bagi penulis dan memberikan informasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan berupa pemahaman pengembangan teori, terutama dalam bidang perpajakan.